DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

Intan Indana Zulva, Arik Susbiyani, Diyah Probowulan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

Transparency of local government financial information can be done through e-government using website media. However, there are still many local governments in East Java who have not revealed it in full. This study aims to determine whether the wealth of the Regional Government, auditor opinion, the ratio of the level of dependency, and the size of the Regional Government have a positive effect on the transparency of the financial information of the Regional Government through the Regional Government's E-Government in East Java. The population in this study were 31 local governments in East Java both districts / cities. The analysis technique used is multiple regression. The results of this study indicate that the wealth of the Regional Government, auditor opinion, the ratio of the level of dependency, and the size of the Regional Government do not have a positive effect on the transparency of the financial information of the Regional Government through e-government of the Regional Government in East Java. It is expected that all Regional Governments, especially in East Java, will make more use of the official website media that they already have in implementing the transparency of their financial information.

Keywords : Regional Government Wealth, auditor's opinion, level of dependency ratio, regional government size, transparency of local government financial information through e-government

1 PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Peristiwa reformasi pada tahun 1998 mendorong perubahan—perubahan di bidang pengelolaan keuangan negara. Membuat akuntabilitas dan transparansi menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan pengguna kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dimana sebagian urusan pemerintahan yang awalnya diurus oleh pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah. Pemda menyusun laporan keuangan, BPK mengaudit dan menyampaikan kepada DPRD.Transparansi publik merupakan hak setiap orang sebagai masyarakat dalam medapatkan segala informasi tentang pemerintah, baik dalam anggaran dan kebijakannya, serta segala proses sampai hasil yang dicapai. Sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang wajib dilindungi Undang-undang dan badan publik wajib menerapkan sistem informasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi publik secara akurat baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Penelitian terdahulu telah dilakukan dengan membandingkan karakteristik pemerintahan daerah yang sebelumnya menggunakan internet sebagai media pengungkapan dengan pemerintah daerah yang memilih untuk tidak menggunakan media internet. Penelitian tersebut dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012); Rora dan Martani (2012); Istikomah dan Kurniawati

(2017); Lilis (2016); Verawaty (2017); Mutiha (2017). Penelitian-penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai determinan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dalam penelitian Istikomah dan Kurniawati (2017) dapat menyimpulkan bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah dari rata-rata indeks pengungkapan informasi non-keuangan. Begitu juga hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan 38 pemerintah daerah baik kabupaten/kota di Jawa Timur juga memperoleh hasil bahwa masih banyak pemerintah daerah baik kabupaten/kota yang masih belum mengungkapkan informasi keuangan dalam *website* nya dengan lengkap. *Website* pemerintah daerah yang baik seharusnya mengungkapkan informasi keuangannya yaitu 12 dokumen di *website* resminya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Tabel 1.1 berikut ini hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018

Jumlah item dokumen mengenai informasi keuangan pemerintah daerah di *website*	Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota
12	1
7-11	2
1-6	28
0	7
Total	**38**

Sumber: *Website* 38 Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *website* pemda baik kabupaten/kota di Jawa Timur hanya 1 pemda yang mengungkapkan dokumen lengkap informasi keuangan pemerintah daerah tahun 2018 di *website* resminya, 30 pemda mengungkapkan dokumen informasi keuangan pemerintah daerah namun tidak lengkap, dan 7 pemda yang sama sekali tidak mengungkapkan dokumen informasi keuangan pemerintah daerah di *website* resminya. Semua Pemda di Indonesia memiliki *websi*te, namun kualitas dan peranannya berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* (*e-government*) masih rendah di Jawa Timur. Dengan rendahnya transparansi yang dilakukan Pemda, membuat menurunnya tingkat kepercayaan di pihak eksternal, seperti masyarakat, investor, dll karena tidak dapat mengetahui pengelolaan keuangan daerah tersebut melalui *website*. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur dengan determinan kekayaan pemerintah daerah, opini auditor, rasio tingkat ketergantungan, dan ukuran pemerintah daerah.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1) Apakah Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?
2) Apakah Opini Auditor berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?
3) Apakah Rasio Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?

4) Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur?

c. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, pada penelitian ini memilik tujuan sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui apakah kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
2) Untuk mengetahui apakah opini auditor berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
3) Untuk mengetahui apakah rasio tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.
4) Untuk mengetahui apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

d. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

1) Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah terutama pemerintah daerah di Jawa Timur untuk mengembangkan kebijakan-kebijakannya dalam melakukan transparansi informasi keuangan daerah melalui *e-government* sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
2) Praktis

   Penelitian ini bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah di Indonesia khususnya di Jawa Timur untuk meningkatkan Transaparansi Informasi Keuangan melalui *e-government*. Selain itu juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor, kreditor, dan donatur dalam melakukan kerjasama dengan Pemda.

2 TINJAUAN PUSTAKA

a. Penelitian Terkait

Berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan judul peneliti yaitu Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui E-Government Pemerintah Daerah di Jawa Timur:

Tabel 2.1
Ringkasan penelitian terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil
1	Istikomah dan Kurniawati Mutmainah	Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet	2017	kekayaan pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet, rasio tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan

				keuangan pemda melalui internet
2	Aditya Rahman, Sutaryo, dan Agus Budiatmanto	Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia	2016	Persaingan Politik, *Leverage*, dan kekayaan pemerintah daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sedangkan *size* dan tipe pemerintah daerah tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet
3	Arthaingan H.Mutiha	Faktor Penentu Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* pada *E-Goverment* Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat	2017	Hasil penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan positif antara ukuran pemda, Pendapatan per kapita penduduk, Belanja daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan aksesibilitas laporan keuangan.
4	**Verawaty**	Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan	2017	Hasil uji yang telah dilakuka menunjukan hanya pendapatan asli daerah (PAD) yang berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan rasio tingkat ketergantungan tidak berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah

Sumber : Istikomah dan Kurniawati (2017), Rahman (2016), Mutiha (2017), Verawaty (2017)

b. Landasan Teori

Teori *signalling* ini merupakan teori dimana pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat atas kinerja yang telah dilaksanakan. Pemerintah memberikan sinyal kepada mayarakat agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Rora dan Martani, 2012). Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. Pemberian sinyal tersebut dapat diberikan melalui keunggulan internet dengan fasilitas *e-government* seperti ini dapat didistribusikan lebih cepat dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri atau transparan dengan menginformasikan laporan keuangannya. Selain itu, informasi pemda dalam *website* juga dapat menarik investor untuk melakukan investasi, pihak donor untuk memberikan hibah dan wisatawan untuk berkunjung yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan dan meningkatkan kinerja pemda.

Teori legitimasi menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi/institusi adalah berasal dari tekanan lingkungan sekitar. Dalam teori ini menjelaskan persamaan asumsi

dimana tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan dan tidak melawan norma yang ada. Teori legitimasi digunakan dalam hubungan antara perusahaan dengan masyarakat agar perusahaan dapat berkembang di masa depan. Begitu juga dalam lingkup pemerintahan, teori legitimasi dapat digunakan untuk hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya agar pemerintah dapat berkembang sesuai dengan kebaikan dan kebutuhan masyarakatnya. Pegungkapan segala bentuk dokumen informasi keuangan dapat menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses aktivitas pemerintah dan juga hasilnya.

Pelaksanaan era otonomi daerah, pemerintah melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Reformasi tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Didalam Undang-Undang ini juga menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 yang diamandemen menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, juga menekankan pada peran akuntansi dan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dan terstruktur. Tujuan disediakannya laporan keuangan adalah untuk menyediakan seluruh informasi sesungguhnya mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pada suatu entitas selama satu periode pelaporan. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa Laporan keuangan pokok terdiri dari :

1) Laporan realisasi anggaran
2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3) Neraca
4) Laporan operasional
5) Laporan arus kas
6) Laporan perubahan ekuitas, dan
7) Catatan atas laporan keuangan

Tujuan umum dari adanya laporan keuangan adalah unutk membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan atau mengevaluasi keputuasan mengenai alokasi sumber daya. Para pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, investor, lembaga legislatif serta pemerintah. Salah satu media yang dapat digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah *website*. Melalui *website* pemerintah daerah, informasi tersebut akan tersampaikan dengan tepat waktu. Semakin cepat waktu peyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009). Dengan melakukan publikasi melalui internet maka pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk mengakes laporan keuangan tersebut. Dengan begitu, memudahkan para pengguna laporan keuangan tersebut dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintahan, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa PAD atau pendapatan asli daerah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan pribadi suatu daerah tersebut dan diatur oleh peraturan daerah itu sendiri. PAD digunakan sebagai proksi dari kekayaan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah akan diperiksa oleh BPK RI sebagai badan pemeriksa keuangan. Tujuan pemeriksaan audit oleh BPK-RI tersebut adalah untuk memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan BPK tersebut didasari dengan empat kriteria, yaitu standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan *(adequate*

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak menyatakan pendapat (TMP).

Rasio tingkat ketergantungan dalam penelitian ini diproksikan dengan DAU atau dana alokasi umum, yang merupakan dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia. DAU diberikan kepada setiap daerah dimaksudkan sebagai dana pembangunan. DAU bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat berbeda dan ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Suatu pemerintahan daerah yang berukuran besar umumnya memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar. Ukuran pemda yang dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah penduduk suatu daerah. Banyaknya jumlah penduduk merupakan gambaran dari besarnya penyediaan layanan publik yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Setelah reformasi, masyarakat semakin peduli terhadap kegiatan pemerintahan, baik dalam keuangan maupun non-keuangan.

c. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

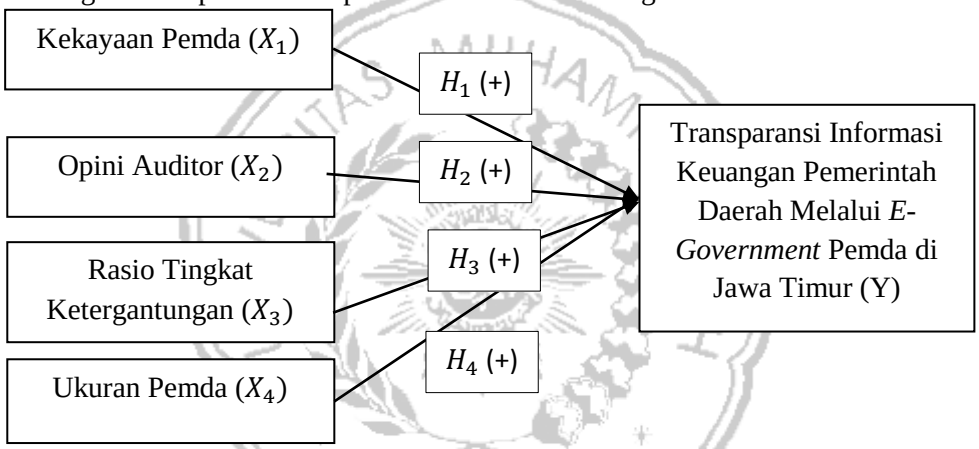

d. Pengembangan Hipotesis

1) Pengaruh Kekayaan Pemda terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur

PAD digunakan sebagai pengukur kekayaan Pemda karena dapat menunjukkan kinerja daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri untuk kepentingan daerahnya sendiri. Berdasarkan *signalling theory* pengungkapan informasi keuangan melalui e-government dapat menjadi sinyal baik dari pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat dapat percaya dan mendudukung kinerja pemerintah kedepannya. PAD yang besar membuat Pemda mengungkapkan informasi keuangannya melalui *website* agar dapat diketahui oleh masyarakat ataupun pihak kepentingan lainnya. Pengaruh Kekayaan Pemda juga diteliti oleh Susbiyani (2015), Susbiyani et.al (2014), Laswad et. al (2005), Aditya, dkk (2016), dan Istikomah Kurniawati (2017) yang menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.

H_1: Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur

2) Pengaruh Opini Auditor terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur

Pemda dengan opini baik yaitu WTP atau WDP akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, opini audit selain WTP/WDP dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan

keuangan daerah, sehingga pemerintah cenderung menutupi informasi keuangannya. Berdasarkan *signalling theory* pengungkapan hasil opini auditor juga dapat menjadi sinyal baik dari pemerintah kepada masyarakat. Pengaruh opini auditor terhadap publikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah melalui internet juga telah dilakukan oleh Istikomah dan Kurniawati (2017), Annisa dan Henny (2018)..

H_2: Opini Auditor berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur

3) Pengaruh Rasio Tingkat Ketergantungan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur

Rasio tingkat ketergantungan pemerintah daerah tergantung dari besaran Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membangun perekonomian dan membangun daerahnya sendiri (Rora dan Martani, 2012). Pemerintah pusat memantau apa yang dilakukan pemda dan tingkat pencapaian kinerja atas alokasi dana umum dari Pemerintah Pusat. Dengan begitu Pemda menggunakan DAU tersebut harus sesusai dengan peraturan dan harapan pemerintah pusat sebagai pemberi meskipun untuk kepenitngan daerahnya, hal ini sesuai dengan teori legistimasi. Penelitian Istikomah dan Kurniawati (2017), Verawaty (2017), dan Diptyana dan Nur'aini (2018) yang menghasilkan bahwa semakin besar rasio tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap Pemda dalam pengungkapan informasi keuangannya melalui *e-government*.

H_3: Rasio tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur

4) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur

Sesuai dengan teori legitimasi dan signalling theory, dimana Pemerintah dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan keinginan masyrakat, karena masyarakat merupakan salah satu pengguna laporan keuangan dan juga salah satu komponen dari suatu daerah tersebut, dan mempublikasikannya melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Susbiyani (2015), Susbiyani et.al (2014), Aditya, dkk (2016) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemda dengan proksi jumlah penduduk yang banyak akan lebih mendorong pemerintah untuk melakukan publikasi informasi keuangan pemda dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit.

H4 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur

3 METODE PENELITIAN

a. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemda kota/kabupaten di Jawa Timur tahun 2018. Sampel ditentukan dengan menggunakan *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau dengan kriteria. Sehingga didapat sampel dalam penelitian ini adalah 31 Pemda di Jawa Timur tahun 2018. Adapun kriteria sampel sebagai berikut : Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang memiliki *e-government* dalam bentuk *website* resmi, Tersedia laporan realisasi APBD tahun 2018 dari situs DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), *Website* resmi pemerintah daerah memuat minimal 1 dokumen pengelolaan anggaran tahun 2018 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012.

b. Desain Penelitian dan Sumber Data

Desain penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang di dapat dari media perantara. Data dikumpulkan melalui observasi melalui media internet yaitu *website* pemda masing-masing terhadap ketersediaan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah pada pemerintah

daerah yang menjadi sampel. Data juga dikumpulkan melalui publikasi laporan-laporan pemerintah daerah melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) (*http://bps.go.id*), situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) (*http://bpk.gp.od*), dan situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (*http://djpk.depkeu.go.id*). Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi rujukan penelitian dalam pengembangan hipotesis dan pengujiannya, yaitu buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah, koran, dan internet.

c. Variabel dan Pengukuran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Jawa Timur (Y) sebagai variabel terikat (variabel dependen), sedangkan variabel bebasnya (variabel independen) adalah Kekayaan Pemerintah Daerah (X1), Opini Auditor (X2), Rasio Tingkat Ketergantungan (X3), dan Ukuran Pemerintah Daerah (X4). Variabel Y ini diukur menggunakan transparansi informasi keuangan pemda melalui *website* yang dinilai dari ada tidaknya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi keuangan pemda. 12 dokumen tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. 12 dokumen tersebut adalah :

a. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
b. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PPKD
c. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
d. Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD
e. Peraturan Daerah tentang APBD
f. Peraturan Daerah tentang P-APBD
g. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
h. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD
i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD
j. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PPKD
k. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit
l. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Variabel dependen diukur dengan skala rasio, dengan pemberian skor terhadap jumlah dokumen yang dipublikasikan oleh pemda melalui *website* nya. Skor 1 jika dokumen tersedia dalam *website*, dan skor 0 jika dokumen tidak tersedia dalam *website*. Setelah skor total didapatkan, maka akan dibagi dengan nilai maksimalnya yaitu 12 sesuai dengan jumlah dokeumen pengelolaan anggaran yang harus diungkapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012. Variabel Kekayaan Pemda diukur menggunakan realisasi PAD suatu daerah. Variabel opini auditor menggunakan skala ordinal denganopini WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1. Variabel rasio tingkat ketergantungan diukur menggunakan realisasi DAU suatu daerah. Variabel ukuran Pemda diukur menggunakan jumlah penduduk suatu daerah.

d. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa analisis data dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedesitas), dan uji analisis regresi berganda karena penelitian ini terdiri dari empat variabel independen (kekayaan pemerintah daerah, opini auditor, rasio tingkat ketergantungan, dan ukuran pemerintah daerah) dan satu variabel dependen (transparansi infromasi keuangan pemda melalui *e-government* pemda di Jawa Timur), sehingga menggunakan persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta 1.X1 + \beta 2.X2 + \beta 3.X3 + \beta 4.X4 + e}$$

Keterangan :

Y = Transparansi Informasi Keuangan Pemda
X1 = Kekayaan Pemda
X2 = Opini Auditor

X3 = Rasio Tingkat Ketergantungan
X4 = Ukuran Pemda
α = Konstansta
β1 = Koefisien Regresi
e = Koefisien Eror

Selanjutnya pengujian dilakukan menggunakan uji hipotesis (uji t, uji kofisien determinasi). Dengan kriteria pengambilan keputusan uji t :

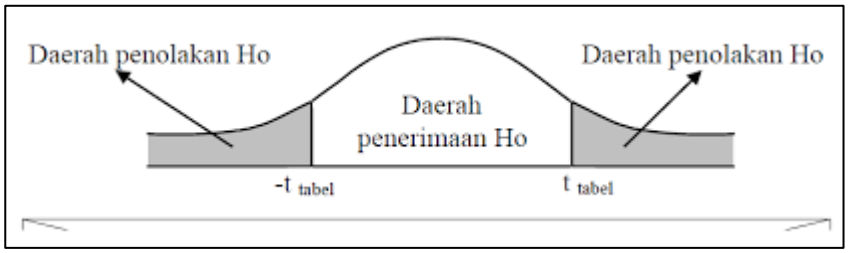

Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Ho dieterima :
   Jika nilai hitung statistik uji (t_{hitung}) berada didaerah penerimaan Ho, dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau sig > α
2) Ho ditolak:
   Jika nilai hitung statistik uji (t_{hitung}) berada didaerah penolakan Ho, dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau sig < α

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Variabel dependen (Y) Transaparansi Informasi Keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur mempunyai rata-rata (mean) 0,25, nilai maksimum 1, nilai minimum 0,08 , dan std. deviasionnya 0,242 dengan data sebanyak 31 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
2) Variabel independen (X1) Kekayaan Pemerintah Daerah mempunyai rata-rata (mean) 508.141.166.217,81, nilai maksimum atau PAD Pemda terbesar di Jawa Timur sebesar Rp. 5.008.916.433,- , nilai minimum atau PAD terendah sebesar Rp. 135.350.335.077,- , dan std. deviasionnya 888.625.165.165,825 dengan data sebanyak 31 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
3) Variabel independen (X2) Opini Auditor dengan rata-rata (mean) 3,97, nilai maksimum 4, nilai minimum 3, dan std. deviasionnya 0,180 dengan data sebanyak 31 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
4) Variabel independen (X3) Rasio Tingkat Ketergantungan mempunyai rata-rata (mean) 900.450.191.643,29, nilai maksimum atau DAU terbesar di Jawa Timur adalah Rp. 1.665.195.901.000,- , nilai minimum atau DAU terendah di Jawa Timur adalah Rp. 4.226.472,- , dan std. deviasionnya 319.495.329.974,855 dengan data sebanyak 31 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
5) Variabel independen (X4) dengan rata-rata (mean) 1.019.137,71, nilai maksimum atau jumlah penduduk terbesar adalah 2.885.555 jiwa, nilai minimum atau jumlah penduduk terendah adalah 128.282 jiwa, dan std. devisionnya 639.166,791 dengan data sebanyak 31 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

b. Uji Normalitas Data

Analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa data terdistribusi secara normal. Dapat dilihat dari nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,066 dan lebih besar dari 0,05 maka

dapat diasumsikan keseluruhan data berdistribusi normal. Hasil sama didapat dari analisis menggunakan grafik histogram pada p plot, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah :

$$Y = \alpha + \beta 1.X1 + \beta 2.X2 + \beta 3.X3 + \beta 4.X4 + e$$

$$Y = -0{,}238 - 1{,}365X_1 + 0{,}082X_2 + 1{,}780X_3 + 1{,}267X_4$$

1) Konstanta adalah -0,238. Artinya jika Kekayaan Pemda, Opini Auditor, Rasio Tingkat Ketergantungan, dan Ukuran Pemda tidak ada atau 0, maka nilai dari Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemda di Jawa Timur sebesar -0,238.
2) Koefisien regresi variabel kekayaan pemda (X_1) adalah -1,365. Artinya kekayaan pemda yang diproksikan dengan PAD (pendapatan asli daerah) bernilai negatif. Sehingga berlawanan, maksutnya kekayaan pemda yang meningkat membuat transparansi informasi keuangan pemda melalui *e-government* pemda di Jawa Timur semakin turun sebesar 1,365.
3) Koefisien regresi variabel opini auditor (X_2) adalah 0,082 yang berarti positif. Artinya jika opini auditor semakin naik maka transparansi informasi keuangan pemda melalui *e-government* pemda di Jawa Timur semakin naik juga sebesar 0,082.
4) Koefisien regresi variabel rasio tingkat ketergantungan (X_3) adalah 1,780 yang berarti positif. Artinya semakin naik rasio tingkat ketergantungan pemda kepada pusat juga akan meningkatkan transparansi informasi keuangan pemda melalui *e-government* pemda di Jawa Timur sebesar 1,780.
5) Koefisien regresi variabel ukuran pemda (X_4) adalah 1,267 yang berarti positif. Artinya dengan ukuran pemerintah mengalami kenaikan maka transparansi informasi keuangan pemda melalui *e-government* pemda di Jawa Timur juga mengalami kenaikan sebesar 1,267.

d. Uji Multikolonieritas

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen karena hasil uji multikolonieritas menunjukan nilai VIF dari seluruh variabel independen kurang dari 10, dan nilai tolerance lebih dari 0,10.

e. Uji Heteroskedesitas

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa tidak adanya heteroskedesitas, karena tebaran data tidak membentuk pola tertentu ataupun pola yang jelas, dan titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

f. Uji Hipotesis

1) Uji t

Tabel 4.5
Ringkasan t Hitung dan t Tabel

Variabel	t Hitung		t Tabel	Sig	H_0	Keterangan
Kekayaan Pemdaa	-0,163	<	-2,0555	0,872	diterima	Tidak berpengaruh
Opini Auditor	0,308	<	2,0555	0,761	diterima	Tidak berpengaruh
Rasio Tingkat Ketergantungan	0,693	<	2,0555	0,494	diterima	Tidak berpengaruh
Ukuran Pemda	0,074	<	2,0555	0,942	diterima	Tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa t hitung variabel kekayaan pemda adalah -0,163 dan lebih besar daripada –t tabel yaitu -2,0555. Dan nilai sig > 0,05 yaitu 0,872. Dari hasil tersebut, maka t hitung dari variabel kekayaan pemda berada di daerah penerimaan Ho pada grafik keputusan, yang artinya hipotesis ini ditolak dan variabel tidak signifikan terhadap pengungkapan transparansi informasi keuangan Pemda melalui e-government Pemda di Jawa Timur. Variabel opini auditor t hitung adalah 0,308 dan lebih kecil daripada t tabel yaitu -2,0555. Dan nilai sig > 0,05 yaitu 0,761. Dari hasil tersebut, maka t hitung dari variabel opini auditor berada di daerah penerimaan Ho pada grafik keputusan, yang artinya hipotesis ini ditolak dan tidak signifikan terhadap Pemda di Jawa Timur dalam pengungkapan transparansi informasi keuangannya melalui *e-government.* t hitung variabel rasio tingkat ketergantungan adalah 0,693 dan lebih kecil daripada t tabel yaitu -2,0555. Dan nilai sig > 0,05 yaitu 0,494. Dari hasil tersebut, maka t hitung dari variabel rasio tingkat ketergantungan berada di daerah penerimaan Ho pada grafik keputusan, yang artinya hipotesis ini ditolak dan tidak signifikan terhadap Pemda di Jawa Timur dalam pengungkapan transparansi informasi keuangannya melalui *e-government.* Dan t hitung variabel ukuran pemda adalah 0,074 dan lebih kecil daripada t tabel yaitu -2,0555. Dan nilai sig > 0,05 yaitu 0,942. Dari hasil tersebut, maka t hitung dari variabel ukuran pemda berada di daerah penerimaan Ho pada grafik keputusan, yang artinya hipotesis ini ditolak dan tidak signifikan terhadap Pemda di Jawa Timur dalam pengungkapan transparansi informasi keuangannya melalui *e-government.*

2) R^2 (Koefisien Determinasi)

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, tabel Model Summary dapat dilihat di lampiran 2 bahwa R Square nya adalah 0,074 atau 7,4%. Dapat diartikan bahwa besarnya presentase sumbangan pengaruh variabel kekayaan pemda, opini auditor, rasio tingkat ketergantungan, dan ukuran pemda terhadap transparansi informasi keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur sebesar hanya 7,4%, dan sisanya 92,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti DAK (dana alokasi khusus), kompetisi politik, leverage, dll.

g. Pembahasan

1) Pengaruh Kekayaan Pemda terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui E-Government Pemda di Jawa Timur

Kekayaan Pemda dengan melihat PAD yang tingggi suatu daerah seharusnya membuat pemda berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama transparansi anggaran suatu daerah melalui berbagai media yang ada. Salah satunya adalah media internet yaitu *e-government* dalam bentuk *website* resmi Pemda, sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah. Karena sebenarnya pengungkapan informasi tersebut merupakan kewajiban setiap Pemda, yang dapat dipublikasikan melalui *e-government*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Istikomah dan Kurniawati (2017), Aditya, dkk (2016), Susbiyani et. al (2014), Laswad et. al (2005) yakni semakin besar kekayaan pemda semakin besar juga tingkat transparansi informasi keuangan suatu pemda. Namun kenyataannya, pada penelitian ini menunjukan bahwa kekayaan pemda di Jawa Timur tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *e-government*. Dilihat dari uji t dimana t hitung berada di daerah penerimaan Ho sehingga Hipotesis ditolak, dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Hasil yang sama juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Arthaingan (2017), Puspita dan Martani (2012), Diptyana dan Nur'aini (2018) dimana Kekayaan Pemda atau PAD tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan suatu pemda. Tidak berpengaruh bukan berarti Pemda di Jawa Timur tidak melakukan transparansi melalui *website* sama sekali, hanya saja pengaruh dari besarnya PAD suatu daerah terhadap tingkat transparansi melalui *website* tidak signifkan.

2) Pengaruh Opini Auditor terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemda di Jawa Timur

Opini atas laporan keuangan suatu pemda didapat dari BPK-RI yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian), WDP (wajar dengan pengecualian), TW (tidak wajar), TMP (tidak memberi pendapat). Opini tersebut dapat mencerminkan kondisi suatu pemda, sehingga opini baik

seperti WTP dan WDP membuat suatu Pemda dapat mempublikasikannya kepada masyarakat sebagai sinyal kinerja baik dari pemerintah melalui berbagai media yang ada, salah satunya media internet yaitu *e-government* berupa *website* resmi Pemda. Karena sebenarnya pengungkapan informasi tersebut merupakan kewajiban setiap Pemda, yang dapat dipublikasikan melalui *e-government*.. Penelitian yang dilakukan oleh Istikomah dan Kurniawati (2017) menjelaskan bahwa opini auditor berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan. Namun kenyataannya, pada penelitian ini opini auditor yang didapat oleh pemda di Jawa Timur tidak mempengaruhi tingkat transparansi keuangan melalui *e-government.* Dilihat dari uji t dimana t hitung berada di daerah penerimaan Ho sehingga Hipotesis ditolak, dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Tidak berpengaruh bukan berarti Pemda dengan opini baik tidak melakukan transparansi informasi keuangannya melalui *e-government*, hanya saja pengaruh dari opini auditor tidak signifikan terhadap tingkat transparansi informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2019), Annisa dan Henny (2018) yang menyebutkan bahwa transparansi atau publikasi melalui *website* resmi tidak tergantung dari opini yang didapat oleh Pemda.

3) Pengaruh Rasio Tingkat Ketergantungan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemda di Jawa Timur

Besarnya DAU yang diterima seharusnya membuat pemda lebih mempunyai kewajiban dalam mempublikasikan infromasi keuangannya kepada masyarakat bahkan kepada pemerintah. Pemerintah sebagai pemberi dana tersebut juga akan mengawasi bagaimana pemda menggunakan dana tersebut, sehingga dengan adanya publikasi melalui media yang ada yaitu website resmi pemda dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Karena sebenarnya pengungkapan informasi tersebut merupakan kewajiban setiap Pemda, yang dapat dipublikasikan melalui *e-government*. Kenyataannya, pada penelitian ini besarnya DAU pemda di Jawa Timur tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi keuangan pemda. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Istikomah dan Kurniawati (2017), Susbiyani et. al (2014), Susbiyani (2015), dan Verawaty (2017) yakni rasio tingkat ketergantungan atau DAU berpengaruh negatif atau tidak signifikan dengan kata lain tidak mempengaruhi transparansi informasi keuangan pemda. Dilihat dari uji t dimana t hitung berada di daerah penerimaan Ho sehingga Hipotesis ditolak, dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Tidak berpengaruh bukan berarti Pemda di Jawa Timur tidak melakukan transparansi sama sekali melalui *e-government*, hanya saja rasio tingkat ketergantungan Pemda terhadap Pemerintah Pusat tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap transparansi melalui *e-government.*

4) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemda melalui *E-Government* Pemda di Jawa Timur

Penduduk yang banyak membuat pemda mempunyai tuntutan yang besar juga untuk mempublikasikan informasi keuangannya melalui media yang tersedia, yaitu website resmi pemda. Namun kenyataanya, pada penelitian ini ukuran pemda tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi keuangan pemda di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arthaingan (2017), Aditya, dkk (2016), Laswad et. al (2005), dan Annisa dan Henny (2018) yang menyimpulkan ukuran pemda terbukti tdak ada hubungan terhadap Pemda dalam melakukan transparansi informasi keuangannya melalui *website*. Dilihat dari uji t dimana t hitung berada di daerah penerimaan Ho sehingga Hipotesis ditolak, dan nilai sig lebih besar dari 0,05. Hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Susbiyani et. al (2014), dan Susbiyani (2015) yang menghasilkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Karena sebenarnya pengungkapan informasi tersebut merupakan kewajiban setiap Pemda, yang dapat dipublikasikan melalui *e-government*. Tidak berpengaruh bukan berarti Pemda di Jawa Timur tidak melakukan transparansi informasi keuangan melalui *e-government*, hanya saja pengaruh dari variabel ukuran Pemda tidak signifikan terhadap transparansi informasi keuangan melalui *e-government*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1) Kekayaan pemda yang diproksikan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi tidak membuat pemda di Jawa Timur lebih meningkatkan transparansi informasi keuangannya melalui *website* resmi. Namun kenyataannya, Pemda dengan PAD dibawah rata-rata nilai transparansinya lebih baik dari pada Pemda dengan PAD diatas rata-rata. Setiap Pemda di Jawa Timur telah melakukan transparansi informasi keuangan melalui *e-government* namun kualitas dan peranan *website* resminya berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekayaan pemda tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur.
2) Opini auditor atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diberikan oleh BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia) kepada pemda di Jawa Timur rata-rata sudah WTP, namun tidak membuat pemda di Jawa Timur lebih meningkatkan transparansi infromasi keuangannya melalui *website* resmi. Terlihat bahwa Pemda di Jawa Timur telah melakukan transparansi informasi keuangan melalui *e-government*, namun kualitasnya berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur.
3) Rasio tingkat ketergantungan diproksikan dengan DAU (Dana Alokasi Umum). DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya membuat pemda mempunyai tanggung jawab atas publikasi, baik kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Namun pemda di Jawa Timur menganggap DAU sebagai dana pembangunan sudah menjadi dana wajib dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga pemda tidak perlu mempublikasikan informasi anggarannya. Sebenarnya Pemda di Jawa Timur telah melakukan transparansi informasi keuangan melalui e-government, hanya saja kualitasnya berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur.
4) Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah membuat pemda memiliki tuntutan yang lebih besar juga terhadap transparansi keuangannya. Pemda di Jawa Timur sebenarnya telah melakukan transparansi informasi keuangan melalui *e-government*, hanya saja kualitasnya berbeda-beda. Saat ini, masyarakat sudah mulai berfikir kritis dan maju, banyak milenial yang peduli dan menganggap perlu mengetahui informasi keuangan daerahnya dan mengawasi jalannya kepemerintahan di daerahnya. Namun pada penelitian ini ukuran pemda terbukti tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *E-Government* pemerintah daerah di Jawa Timur.

b. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan kepada pihak Pemerintah Daerah baik kabupaten/kota di Jawa Timur untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah. Seluruh pemda di Jawa Timur sudah mempunyai *website* resmi, maka dari itu transparansi dapat dilakukan melalui media yang sudah ada, yaitu *website* resmi Pemerintah Daerah. Dengan mempublikasikan segala dokumen yang berisi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *e-government* bisa membuat masyarakat dan pemerintah lebih percaya lagi terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, *website* yang sudah ada dapat diperbaiki lagi dengan desain dan menu-menu yang menarik, agar masyarakat yang mengakses tidak jenuh dan merasa senang saat mengaksesnya.

c. Rekomendasi

1) Menambahkan variabel penelitian yang diduga memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui *e-government* pemda di Jawa Timur, misalnya *leverage*, kompetisi politik, dan dana alokasi khusus (DAK).

2) Diharapkan dapat menggunakan waktu periode yang lebih panjang, sehingga lebih kelihatan perkembangan tingkat transparansi informasi keuangannya melalui *e-government* terutama di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Rifka dan Henny Murtini, 2018, "The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government," *Accounting Analysis Journal*. Vol 7 (1), h. 43-51.

Diptyana Pepie dan Nur'aini Rokhmania, 2018, "Exploring government internet financial reporting in Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*Vol 21 (1), h. 115-138.

Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisisi Multivariate dengan Program IBM SPSS21 Update PLS Regresi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasanah, Uswatun, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Hilmi Amirudin Z. dan Dwi Martani, 2012, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi," *Jurnal Prosiding dan Simposium Nasional Akuntansi*, Universitas Indonesia.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Istikomah dan Kurniawati Mutmainah, Januari 2017, "Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet," *Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah.* Volume 12 (1), ISSN: 1907-426X.

Laswad, F. Fisher R. dan Oyelere, P., 2005, "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities," *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 2, h.101-121

Lesmanawati, Dewi, 2019, "Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenuedan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Secara Online," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 15 (2), h. 109-116.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

Mutiha, Arthaingan H., Juli 2017, "Faktor Penentu Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* pada *E-Government* Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat," *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas Widyatama*. ISSN: 2252-39936.

Verawaty, 2017, "Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan," *Akuisisi Journal of Accounting & Finance*. Volume 13 (2), P 92-107.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Petanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Puspita Rora dan Dwi Martani, 2012, *Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.

Rahman, Aditya P. dkk, September 2013, "Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia," *Simposium Nasionan Akuntansi XVI*, Manado.

Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Bandung: Fokusindo Mandiri.

Setyowati, Lilis, April 2016, "Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Volume 6 (1), P 45-62.

Susbiyani, Arik, 2015, "Quality Of Financial Statements As Implementation Good Governance Government On Local Government In Indonesia," *Research Journal Of Finance And AcOounting*. Volume 6 (14), ISSN: 2222-1697.

Susbiyani, Arik dkk, 2014, "The Compliance With Mandatory Disclousure Of Financial Statement: A Study From Local Government In Indonesia," *Research Journal Of Finance And Acoounting*. Volume 5 (10), ISSN: 2222-1697.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JEMBER